

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013 – 2015 dengan jumlah perusahaan 137. Penarikan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel secara acak dan menggunakan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Penarikan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015	137
2	Perusahaan dengan nilai CETR>1	(3)
3	Perusahaan yang memiliki <i>pre-tax income</i> negatif	(56)
4	Perusahaan yang tidak mempunyai Kepemilikan Institusional	(2)
5	Perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan negatif	(40)
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria		36
Tahun pengamatan		3
Total sampel		108

Sumber : Data Diolah, 2017

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi. Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut. Hasil analisis deskriptif adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Uji Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	108	.06	.72	.2974	.13265
INST	108	.23	.98	.7280	.18032
PDK	108	.20	.80	.4015	.11097
KOM_AUD	108	3.00	5.00	3.1296	.41226
KONACC	108	-.64	.68	-.0264	.11439
GROWTH	108	.00	.48	.1383	.10822
DER	108	.02	.58	.1319	.12888
Valid N (listwise)	108				

Sumber: Output SPSS 20, 2017

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan uji statistik *kolmogorov-smirnov*. Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *kolmogorov-smirnov* dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		108
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.12809375
	Absolute	.145
Most Extreme Differences	Positive	.145
	Negative	-.064
Kolmogorov-Smirnov Z		1.505
Asymp. Sig. (2-tailed)		.022

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS 20, 2017

Dari hasil uji kolmogorov-smirnov di atas, dihasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,022. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini tidak terdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) di bawah 0,05. Model regresi tersebut belum layak untuk digunakan analisis selanjutnya. Untuk menormalkan data maka perlu dilakukan treatment yaitu menghapus data outlier. Data outlier adalah data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi – observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim (Ghozali, 2005:41). Data outlier ini harus dihapus dari pengamatan. Deteksi terhadap outlier dapat dilakukan dengan menentukan nilai batas yang akan dikategorikan sebagai data outlier yaitu dengan cara mengkonversi nilai data kedalam skor *standardized* atau yang bisa disebut *Z-score*. Untuk sampel besar standar skor dinyatakan outlier jika nilainya pada

kisaran 3 sampai 4. Batasan nilai tersebut cenderung menghasilkan normalitas yang lebih baik. Berikut rincian dalam menghapus data outlier:

3. PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) dengan nilai *Z-score* 4.53691 terdapat pada variabel komite audit pada tahun 2013 – 2015.
4. PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) dengan nilai *Z-score* 3.59059 terdapat pada variabel proporssi dewan komisaris pada tahun 2013 – 2015.
5. PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) dengan nilai *Z-score* 3.45358 dan 3.32944 terdapat pada variabel *leverage* masing – masing pada tahun 2013 dan 2014.

Data outlier diatas akan dihapus dari sampel penelitian agar menghasilkan normalitas yang lebih baik sehingga layak untuk digunakan analisis selanjutnya. Dengan menggunakan data outlier maka jumlah sampel akan berkurang. Oleh karena itu akan menguji kembali analisis statistik deskriptif dan uji normalitas. Berikut rincian dalam pengambilan sampel penelitian dengan menggunakan data outlier:

Tabel 4.4 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian dengan Data Outlier

No.	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015	137
2	Perusahaan dengan nilai CETR>1	(3)
3	Perusahaan yang memiliki <i>pre-tax income</i> negatif	(56)
4	Perusahaan yang tidak mempunyai Kepemilikan Institusional	(2)
5	Perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan negatif	(40)
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria		36
Data Outlier		3

Jumlah sampel dengan data outlier	33
Tahun pengamatan	3
Total sampel yang digunakan dalam penelitian	99

Sumber : Data Diolah, 2017

4.4 Analisis Statistik Deskriptif Setelah Eliminasi Outlier

Berdasarkan penarikan sampel pada tabel 4.4 diatas maka akan menguji kembali statistik deskriptif. Statistik deskriptif akan memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi. Berikut tabel 4.5 statistik deskriptif:

Tabel 4.5 Uji Deskriptif Statistik Setelah Eliminasi Outlier

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	99	.06	.72	.3019	.13489
INST	99	.23	.98	.7346	.18230
PDK	99	.20	.67	.3936	.09074
KOM_AUD	99	3.00	4.00	3.0808	.27393
KONACC	99	-.64	.68	-.0273	.11851
GROWTH	99	.00	.48	.1399	.11124
DER	99	.02	.53	.1215	.11613
Valid N (listwise)	99				

Sumber : Output SPSS 20, 2017

Dari hasil analisis deskriptif pada table 4.5 menunjukkan sebagai berikut:

1. Nilai minimum penghindaran pajak perusahaan adalah sebesar 0,06 yang diperoleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk pada tahun 2013. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai penghindaran pajak paling rendah diantara perusahaan sampel adalah sebesar 0,06. Sedangkan nilai maksimum penghindaran pajak adalah sebesar 0,72 yang diperoleh PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk

pada tahun 2014. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai penghindaran pajak paling tinggi diantara perusahaan sampel adalah sebesar 0,72. Nilai rata-rata penghindaran pajak tahun 2013 – 2015 adalah sebesar 0,3019 dengan standar deviasi sebesar 0,13489. Nilai rata-rata tersebut dapat diartikan bahwa perbandingan antara nilai pajak yang dibayar tunai terhadap laba sebelum pajak adalah sebesar 0,3019 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,13489 dapat diartikan bahwa tingkat ukuran penyebaran data variabel penghindaran pajak adalah sebesar 0,13489.

2. Nilai minimum kepemilikan institusional adalah sebesar 0,23 yang diperoleh PT Wismilak Inti Makmur Tbk pada tahun 2013-2015. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai kepemilikan institusional paling rendah diantara perusahaan sampel adalah sebesar 0,23. Sedangkan nilai maksimum kepemilikan institusional adalah sebesar 0,98 yang diperoleh PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk pada tahun 2013 – 2015, PT HM Sampoerna Tbk pada tahun 2013 – 2014, dan PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk pada tahun 2013 – 2015. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai kepemilikan institusional paling tinggi diantara perusahaan sampel adalah sebesar 0,98. Nilai rata-rata kepemilikan institusional tahun 2013 – 2015 adalah sebesar 0,7346 dengan standar deviasi sebesar 0,18230. Nilai rata-rata tersebut dapat diartikan bahwa tingkat kepemilikan institusional di Indonesia adalah sebesar 73.46% sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,18230 dapat diartikan bahwa tingkat ukuran penyebaran data variabel kepemilikan institusional adalah sebesar 0,18230.

3. Nilai minimum proporsi dewan komisaris adalah sebesar 0,20 yang diperoleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk pada tahun 2013-2015. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai proporsi dewan komisaris paling rendah diantara perusahaan sampel adalah sebesar 0,20. Sedangkan nilai maksimum proporsi dewan komisaris adalah sebesar 0,67 yang diperoleh PT Jembo Cable Company Tbk. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai proporsi dewan komisaris paling tinggi diantara perusahaan sampel adalah sebesar 0,67. Nilai rata-rata proporsi dewan komisaris tahun 2013 – 2015 adalah sebesar 0,3936 dengan standar deviasi sebesar 0,09074. Nilai rata-rata tersebut dapat diartikan bahwa tingkat proporsi dewan komisaris di Indonesia adalah sebesar 39.36% sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,09074 dapat diartikan bahwa tingkat ukuran penyebaran data variabel proporsi dewan komisaris adalah sebesar 0,09074.
4. Nilai minimum komite audit adalah sebesar 3,00. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai komite audit paling rendah diantara perusahaan sampel adalah sebesar 3,00. Sedangkan nilai maksimum komite audit adalah sebesar 4,00 yang diperoleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk pada tahun 2013 – 2015, PT Darya Varia Laboratoria Tbk pada tahun 2013 – 2014 dan PT Mandom Indonesia Tbk pada tahun 2013 – 2015. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai komite audit paling tinggi diantara perusahaan sampel adalah sebesar 4,00. Nilai rata-rata komite audit tahun 2013 – 2015 adalah sebesar 3,0808 dengan standar deviasi sebesar 0,27393 yang dapat diartikan bahwa tingkat ukuran penyebaran data variabel komite audit adalah sebesar 0,27393.

5. Nilai minimum konservatisme akuntansi adalah sebesar $-0,64$ yang diperoleh PT Nippon Indosari Corporindo Tbk pada tahun 2015. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai konservatisme akuntansi paling rendah diantara perusahaan sampel adalah sebesar $-0,64$. Sedangkan nilai maksimum konservatisme akuntansi adalah sebesar $0,68$ yang diperoleh PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk pada tahun 2015. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai konservatisme akuntansi paling tinggi diantara perusahaan sampel adalah sebesar $0,68$. Nilai rata-rata konservatisme akuntansi tahun 2013 – 2015 adalah sebesar $-0,0273$ dengan standar deviasi sebesar $0,11851$. Nilai rata-rata tersebut dapat diartikan bahwa tingkat konservatisme akuntansi di Indonesia adalah sebesar $-2,73\%$ sedangkan nilai standar deviasi sebesar $0,11851$ dapat diartikan bahwa tingkat ukuran penyebaran data variabel konservatisme akuntansi adalah sebesar $0,11851$.
6. Nilai minimum pertumbuhan penjualan adalah sebesar $0,00$ yang diperoleh PT Indo Kordsa Tbk dan PT Mandom Indonesia Tbk masing – masing pada tahun 2015 dan PT Darya Varia Laboratoria Tbk pada tahun 2014. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai pertumbuhan penjualan paling rendah diantara perusahaan sampel adalah sebesar $0,00$. Sedangkan nilai maksimum pertumbuhan penjualan adalah sebesar $0,48$ yang diperoleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk pada tahun 2013. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai pertumbuhan penjualan paling tinggi diantara perusahaan sampel adalah sebesar $0,48$. Nilai rata-rata pertumbuhan penjualan tahun 2013 – 2015 adalah sebesar $0,1399$ dengan standar deviasi sebesar $0,11124$. Nilai rata-

rata tersebut dapat diartikan bahwa tingkat pertumbuhan penjualan di Indonesia adalah sebesar 13,99% sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,11124 dapat diartikan bahwa tingkat ukuran penyebaran data variabel pertumbuhan penjualan adalah sebesar 0,11124.

7. Nilai minimum *leverage* adalah sebesar 0,02 yang diperoleh PT Semen Baturaja Persero Tbk pada tahun 2014 – 2015, PT Ekadharmatama Tbk pada tahun 2013, PT Gudang Garam Tbk pada tahun 2013 – 2015, PT Kalbe Farma Tbk pada tahun 2013 - 2014, dan PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk pada tahun 2013. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai *leverage* paling rendah diantara perusahaan sampel adalah sebesar 0,02. Sedangkan nilai maksimum *leverage* adalah sebesar 0,53 yang diperoleh PT Mandom Indonesia Tbk pada tahun 2014. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai *leverage* paling tinggi diantara perusahaan sampel adalah sebesar 0,53. Nilai rata-rata *leverage* tahun 2013 – 2015 adalah sebesar 0,1215 dengan standar deviasi sebesar 0,11613. Nilai rata-rata tersebut dapat diartikan bahwa tingkat *leverage* di Indonesia adalah sebesar 12,15% sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,11613 dapat diartikan bahwa tingkat ukuran penyebaran data variabel *leverage* adalah sebesar 0,11613.

4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik Setelah Eliminasi Outlier

4.5.1 Hasil Uji Normalitas Setelah Eliminasi Outlier

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal. Oleh sebab itu uji normalitas akan diujikan kembali untuk mendapatkan tingkat normalitas setelah dilakukan pengeliminasian outlier. Berikut adalah hasil uji

normalitas dengan menggunakan uji *kolmogorov-smirnov* setelah dilakukan pengelimitasian data outlier:

Tabel 4.6 Uji Normalitas Setelah Eliminasi Outlier

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.12256242
	Absolute	.133
Most Extreme Differences	Positive	.133
	Negative	-.051
Kolmogorov-Smirnov Z		1.319
Asymp. Sig. (2-tailed)		.062

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS 20, 2017

Dari hasil uji kolmogorov-smirnov di atas, dihasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,062. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini terdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) di atas 0,05.

4.5.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Uji ini untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas yaitu hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah tidak adanya multikolinieritas. Berikut adalah hasil dari uji multikolinieritas:

Tabel 4.7 Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.564	.180		3.139	.002		
INST	-.033	.073	-.044	-.451	.653	.925	1.082
PDK	.412	.148	.277	2.788	.006	.906	1.103
1 KOM_AUD	-.134	.053	-.272	-2.510	.014	.764	1.308
KONACC	.229	.119	.201	1.929	.057	.825	1.212
GROWTH	-.132	.117	-.109	-1.130	.262	.963	1.039
DER	.310	.135	.267	2.298	.024	.667	1.500

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: Output SPSS 20, 2017

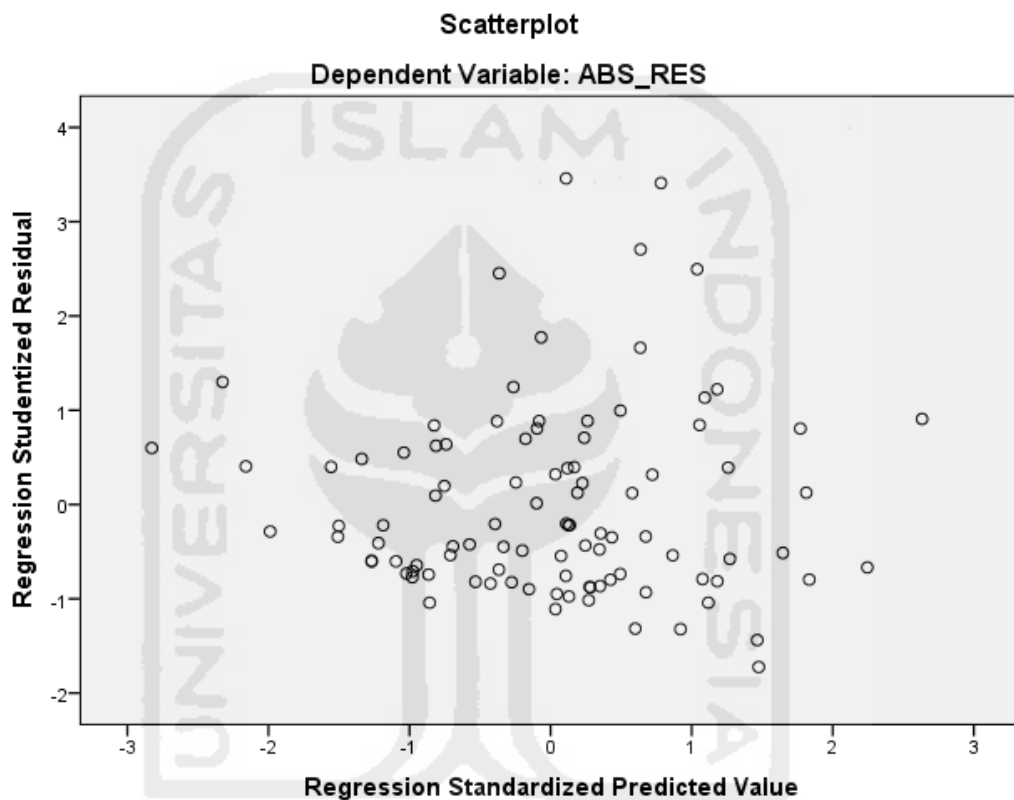
Berdasarkan Tabel 4.7 dari hasil analisis uji multikolinieritas di atas, maka dihasilkan nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, yaitu 1.082 untuk variabel kepemilikan institusional, 1.103 untuk variabel proporsi dewan komisaris independen, 1.308 untuk variabel komite audit, 1.212 untuk variabel konservatisme akuntansi, 1.039 untuk variabel pertumbuhan penjualan, 1.500 untuk variabel *leverage*. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

4.5.3 Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik *scatterplots*, jika grafik terlihat titik-titik

menyebar secara acak dan tersebar di atas maupun dibawah angka 0 sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastistas pada model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.1 di bawah ini :

Gambar 4.1 Grafik *Scatterplots*



Sumber: Output SPSS 20, 2017

Dari hasil analisis uji heteroskedastisitas di atas, pada grafik *scatterplot* terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di atas maupun dibawah angka 0 sumbu Y. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

4.5.4 Hasil Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat diartikan adanya kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji *durbin watson*. Nilai D-W dari model regresi berganda terpenuhi jika nilai $d_u < d_{hitung} < d_4 - d_u$. Hasil analisis uji autokorelasi dengan uji *durbin watson* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.418 ^a	.174	.121	.12650	2.133

a. Predictors: (Constant), DER, GROWTH, INST, PDK, KONACC, KOM_AUD

b. Dependent Variable: CETR

Sumber: Output SPSS 20, 2017

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, dihasilkan *durbin Watson* sebesar 2.133. Nilai ini akan dibandingkan dengan DW tabel dengan jumlah sample 99, jumlah variabel bebas 6 dan tingkat kepercayaan 5% di dapat nilai batas bawah (d_l) = 1,5467 dan batas atas (d_u) = 1,8029. Oleh karena nilai DW 2,133 berada di antara batas atas (d_u) = 1,8029 dan ($4 - d_u$) = 2,1971, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.7 di atas. Dari hasil analisis regresi

linier berganda di atas, maka model persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 0.564 - 0.033INST + 0.412PDK - 0,134KOM_AUD + 0,229KONACC - 0.132GROWTH + 0,310DER$$

Dari hasil model persamaan regresi diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Nilai intercept konstanta sebesar 0,564. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila besarnya nilai seluruh variabel independen adalah 0, maka besarnya penghindaran pajak akan sebesar 0,564.
2. Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan institusional sebesar -0,033. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila kepemilikan institusional bertambah satu persen, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar -0,033 satuan dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
3. Nilai koefisien regresi variabel proporsi dewan komisaris sebesar 0,412. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila proporsi dewan komisaris bertambah satu persen, maka penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,412 satuan dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
4. Nilai koefisien regresi variabel komite audit sebesar -0,134. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila komite audit bertambah satu persen, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,134 satuan dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
5. Nilai koefisien regresi variabel konservatisme akuntansi sebesar 0,229. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila konservatisme akuntansi bertambah satu

persen, maka penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,229 satuan dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.

6. Nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan penjualan -0,132. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila pertumbuhan penjualan bertambah satu persen, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar -0,132 satuan dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
7. Nilai koefisien regresi variabel *leverage* sebesar 0,310. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila *leverage* bertambah satu persen, maka penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,310 satuan dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.

4.6.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.121. Hal ini menandakan bahwa variabel kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, konservatisme akuntansi, pertumbuhan penjualan dan *leverage* hanya dapat menjelaskan 12,1% variasi penghindaran pajak. sedangkan sisanya yaitu 87,9% (100% - 12,1%) dijelaskan oleh variabel – variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

4.6.2 Hasil Uji Statistik T

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji regresi secara parsial telah ditunjukkan pada Tabel 4.7 diatas. Adapun hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis pertama

Hasil dari pengujian signifikansi koefisien regresi variabel kepemilikan institusional, hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Besarnya koefisien regresi kepemilikan institusional yaitu -0,033 dan nilai signifikansi sebesar 0,653. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan karena signifikansi $0,653 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis pertama penelitian ini tidak terbukti.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Hasil dari pengujian signifikansi koefisien regresi variabel proporsi dewan komisaris, hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Besarnya koefisien regresi proporsi dewan komisaris yaitu 0,412 dan nilai signifikansi sebesar 0,006. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan karena signifikansi $0,006 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis kedua penelitian ini tidak terbukti.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Hasil dari pengujian signifikansi koefisien regresi variabel komite audit, hipotesis ketiga penelitian ini menyatakan bahwa komite audit

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Besarnya koefisien regresi komite audit yaitu -0,134 dan nilai signifikansi sebesar 0,014. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena signifikansi $0,014 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis ketiga penelitian ini terbukti.

4. Pengujian Hipotesis Keempat

Hasil dari pengujian signifikansi koefisien regresi variabel konservatisme akuntansi, hipotesis keempat penelitian ini menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Besarnya koefisien regresi konservatisme akuntansi yaitu 0,229 dan nilai signifikansi sebesar 0,057. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan karena signifikansi $0,057 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis keempat penelitian ini tidak terbukti.

5. Pengujian Hipotesis Kelima

Hasil dari pengujian signifikansi koefisien regresi variabel pertumbuhan penjualan, hipotesis kelima penelitian ini menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Besarnya koefisien regresi pertumbuhan penjualan yaitu -0,132 dan nilai signifikansi sebesar 0,262. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan karena signifikansi $0,262 > 0,05$ sehingga

dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis kelima penelitian ini tidak terbukti.

6. Pengujian Hipotesis Keenam

Hasil dari pengujian signifikansi koefisien regresi variabel, hipotesis keenam penelitian ini menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Besarnya koefisien regresi *leverage* yaitu 0,310 dan nilai signifikansi sebesar 0,024. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena signifikansi $0,024 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis keenam penelitian ini tidak terbukti.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian hipotesis pertama dapat dilihat bahwa hubungan variabel kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak memiliki nilai signifikansi 0,653. Nilai tersebut lebih dari 0,05, maka diperoleh bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien regresi kepemilikan institusional sebesar -0,033. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki arah negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini belum dapat membuktikan hipotesis pertama penelitian.

Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Sandy dan Lukviarman (2015) bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak tidak ditentukan oleh variabel kepemilikan institusional. Dengan kata lain tinggi atau rendahnya persentase saham yang dimiliki institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang diterbitkan atau saham beredar tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini belum dapat membuktikan pengaruh kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau bank kecuali kepemilikan individual. Besar persentase kepemilikan institusional perusahaan sampel adalah sebesar 0,7346 atau 73,46%. Walaupun memiliki persentase yang cukup besar namun kepemilikan institusional di dalam suatu perusahaan tidak mampu menjadi *controller* atas kegiatan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan pemilik institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan tersebut kepada dewan komisaris, karena itu merupakan tugas dewan komisaris yang mewakili pemilik institusional. Akan tetapi ada atau tidaknya kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan tetap saja akan terjadi penghindaran pajak (Fitri Damayanti dan Susanto, 2015). Dengan demikian kepemilikan institusional belum dapat memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan penghindaran pajak.

4.7.2 Proporsi Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian hipotesis kedua dapat dilihat bahwa hubungan variabel proporsi dewan komisaris dengan penghindaran pajak memiliki nilai signifikansi 0,006. Nilai tersebut lebih rendah dari 0,05, maka diperoleh hasil bahwa proporsi dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien regresi proporsi dewan komisaris sebesar 0,412. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini belum dapat membuktikan hipotesis kedua yaitu proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan masih terdapat perusahaan dengan proporsi komisaris independen kurang dari 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Dengan lebih banyaknya dewan komisaris yang terafiliasi dibanding dengan komisaris independen maka proses monitoring terhadap manajer menjadi kurang efektif sehingga celah untuk melakukan tindakan penghindaran pajak semakin tinggi. Disamping itu komisaris independen yang seharusnya dapat mengurangi aktivitas penghindaran pajak di dalam perusahaan tidak berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan pengangkatan komisaris independen sebagian berdasarkan atas penghargaan, hubungan keluarga dan nepotisme (Effendi, 2009). Dengan adanya penghargaan, maka komisaris independen dapat melakukan penghindaran pajak yang diminta oleh manajer agar mendapatkan penghargaan tersebut. Sehingga semakin tinggi proporsi dewan komisaris maka semakin tinggi pula tindakan

penghindaran pajak. Oleh sebab itu, seharusnya persyaratan untuk dapat diangkat sebagai komisaris independen seharusnya sangat ketat, antara lain memiliki integritas dan kompetensi yang memadai sehingga kinerja komisaris dapat lebih ditingkatkan sehingga penghindaran pajak dalam perusahaan dapat diminimalisir.

4.7.3 Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian hipotesis ketiga dapat dilihat bahwa hubungan variabel komite audit dengan penghindaran pajak memiliki nilai signifikansi 0,014. Nilai tersebut lebih rendah dari 0,05, maka diperoleh hasil bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien regresi komite audit sebesar -0,134. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini dapat membuktikan hipotesis ketiga yaitu komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Sandy dan Lukviarman (2015) bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikannya setiap perusahaan selama tahun pengamatan telah memenuhi persyaratan dari BAPEPAM yaitu keanggotaan komite audit sekurang – kurangnya adalah 3. Dengan begitu proses monitoring komite audit terhadap manajemen akan lebih efektif, sehingga tindakan penghindaran pajak dapat diminimalisir.

4.7.4 Konservatisme Akuntansi terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian hipotesis keempat dapat dilihat bahwa hubungan variabel konservatisme akuntansi dengan penghindaran pajak memiliki nilai signifikansi 0,057. Nilai tersebut lebih dari 0,05, maka diperoleh hasil bahwa konservatisme akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien regresi konservatisme akuntansi sebesar 0,229. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa konservatisme akuntansi memiliki arah positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini belum dapat membuktikan hipotesis keempat yaitu konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Pramudito dan Sari (2015) dan Jaya et al. (2014) bahwa konservatisme akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Besar persentase konservatisme akuntansi perusahaan sampel adalah sebesar 71 % atau 70 perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi dan sisanya 29 perusahaan tidak menerapkan konservatisme akuntansi. Seharusnya dengan prosentase konservatisme akuntansi yang cukup besar diharapkan dapat meminimalisasikan penghindaran pajak. Hal ini kemungkinan dikarenakan prinsip konservatisme merupakan hasil dari penundaan pengakuan terhadap laba dan aktiva, sementara dengan segera mengakui beban, dan utang. Hal ini dapat mengakibatkan *understatement* terhadap laba yang dilaporkan untuk periode saat ini, tetapi *overstatement* (lebih

besar dari yang seharusnya terhadap laba yang dilaporkan untuk periode yang akan datang (Savitri, 2016). Pada waktu *understatement* atau laba yang dilaporkan lebih rendah maka pajak yang dikenakan juga rendah. Namun pada waktu *overstatement* laba yang dilaporkan juga lebih besar sehingga pajak yang dikenakan juga akan lebih besar. Pada waktu *overstatement* tersebut kemungkinan manajemen dapat melakukan penghindaran pajak karena pajak yang dibebankan menjadi lebih tinggi. Sehingga penerapan prinsip konservatisme tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.7.5 Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian hipotesis kelima dapat dilihat bahwa hubungan variabel pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak memiliki nilai signifikansi 0,262. Nilai tersebut lebih dari 0,05, maka diperoleh hasil bahwa pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien regresi pertumbuhan penjualan yaitu -0,132. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki arah negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini belum dapat membuktikan hipotesis kelima yaitu pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Singly dan Sukartha (2015) bahwa pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Memperkecil penghasilan dengan cara hanya melaporkan

sebagian, merendahkan harga jual, memilih menjual kepada pengusaha non PKP dalam bentuk faktur pajak sederhana agar lebih mudah tidak melaporkan penjualannya (Hanum, 2005). Hal tersebut dapat memperkecil pajak yang dipungut dari segi penjualan namun bukan berarti perusahaan dengan cara demikian dapat menghindari pajak yang lain seperti PPN, PPNBM, BPHTB, dan PBB yang tetap menjadi kewajiban perusahaan. Disamping itu melihat Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 4 (1) UU PPh yang menjadi objek PPh badan diantaranya adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, hadiah dari undian dan penghargaan, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan, bunga, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, royalti atau imbalan, keuntungan selisih kurs mata uang asing dll. Dimana objek pajak tersebut diluar dari kegiatan penjualan atau *active income* yang tetap harus dibayar oleh perusahaan. Dengan demikian pertumbuhan penjualan yang meningkat ataupun menurun tidak akan ada pengaruhnya terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

4.7.6 Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis keenam yang diajukan dalam penelitian ini adalah *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian hipotesis keenam dapat dilihat bahwa hubungan variabel *leverage* dengan penghindaran pajak memiliki nilai signifikansi 0,024. Nilai tersebut lebih rendah dari 0,05, maka diperoleh hasil bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien regresi *leverage* sebesar 0,310. Hasil penelitian ini

menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini belum dapat membuktikan hipotesis keenam yaitu *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015), serta Richardson dan Lanis (2007) yang telah membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini kemungkinan perusahaan yang sudah *well-established* akan lebih mudah memperoleh modal dipasar modal, kemudahan akses tersebut berarti membuat wajib pajak badan memilih untuk mengurangi *financial leverage* dengan meminilalisir dan mengefisiensikan penggunaan utang sehingga mengurangi beban tetap yang timbul karena utang, baik utang jangka panjang atau jangka pendek (Sofia, 2014).

